

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Persepsi Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Persepsi

O'Brien dan Daniel (2014) dalam Priasmoro,D.P.,Widjajanto,E.,& Supriati,L.(2016) menyatakan bahwa fokus utama teori mengetahui adalah persepsi. Pengalaman kita tentang alam semesta melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa adalah dasar dari semua pengetahuan empiris. Reaksi langsung seseorang (penerimaan) terhadap sesuatu dan proses di mana mereka belajar tentang berbagai hal melalui penggunaan indra mereka adalah contoh persepsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Persepsi adalah pemahaman tentang hal-hal, kejadian, atau hubungan yang didasarkan pada pengetahuan dan mengubah kata-kata menjadi pesan. Persepsi yaitu memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).

Persepsi adalah kapasitas seseorang untuk mengenali, mengkategorikan, memusatkan perhatian mentalnya, dan menafsirkan suatu objek. Stimulus dari lingkungan seseorang yang diberikan kepada seseorang secara instan membantu membentuk sudut pandang orang tersebut. Selain itu, masukan tersebut diterima oleh otak melalui panca indera, yang diproses oleh fungsi mental untuk memperdalam pemahaman. Wenburg dan William W. Wilmot, mengklaim bahwa makhluk memberi makna melalui penglihatannya (Mulyana, 2000, halaman 167).

Karena mudah untuk mengidentifikasi asumsi yang terkait dengan persepsi manusia, sebenarnya keduanya menandakan hal yang sama. Indera kulit, yang memungkinkan seseorang untuk merasakan tekstur suatu bentuk, indera mata, dan indera pendengaran semuanya memainkan peran kunci dalam penciptaan persepsi dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk mendengar sesuatu dan kemudian menanggapi berdasarkan persepsi kita terhadapnya membuat telinga sama pentingnya dengan penglihatan. Pengalaman yang dialami orang sepanjang hidup mereka berdampak besar pada cara mereka bereaksi.

2.1.1.2 Pengertian Masyarakat

Dalam arti luas, masyarakat dapat digambarkan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dengan baik, sering berhubungan, dan berbagi minat dan aspirasi yang sama. Paul B. Horton dan C. Hunt mendefinisikan masyarakat sebagai kumpulan individu yang biasanya mandiri satu sama lain, hidup bersama untuk waktu yang cukup lama, tinggal di wilayah tertentu, berbagi budaya yang sama, dan terlibat kegiatan sebagai kelompok dalam Normina (2017, hlm. 108). Hendropuspito OC (1989) dalam Kadafi (2019) mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok individu yang memiliki budaya yang sama, tinggal di lokasi yang sama, dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Masyarakat ini unik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) batas dan wilayah yang jelas; (2) populasi yang kohesif; (3) beragam pengelompokan fungsional; (4) pelaksanaan fungsi umum; dan (5) budaya yang khas.

Persepsi masyarakat adalah proses dimana kelompok manusia yang ada dan berada di lokasi tertentu serta menilai terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya

2.1.2 Kesetaraan Gender

2.1.2.1 Pengertian Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Setara berarti sejajar, sederajat, atau sederajat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah keadaan sejajar satu sama lain, tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Pendapat mengenai kesetaraan manusia menjelaskan bahwa semua makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa berada pada pijakan yang sama. Tingkatan dan derajat yang sama, yaitu berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada jenis makhluk lain dan setara dengan makhluk mulia. Manusia memiliki peran khusus dalam masyarakat karena mereka adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kesetaraan adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial. Bagian yang diperankan orang dalam sistem sosial terkait erat dengan peran kesetaraan manusia. Selain hak atas perlakuan yang sama di bawah hukum, kesetaraan mencakup kemampuan untuk memilih, mengekspresikan diri secara bebas, menerima perawatan medis, dan menerima pendidikan.

Dalam masyarakat tempat kita hidup, terdapat berbagai tingkat pendidikan, gelar, dan tanggung jawab. Manusia bagaimanapun patuh pada kewajiban yang sama seperti orang lain, terlepas dari perbedaan-perbedaan ini. Nilai mendasar kesetaraan telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri sejak tahun 1945, serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Begitu pula perihal hak, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kedudukan, memperoleh pendidikan, memperoleh pekerjaan yang memberikan upah layak, bahkan memiliki status dan peran yang sama. UUD 1945 tertulis memuat acuan prinsip kesetaraan gender, baik secara jelas maupun logis. Hal ini terbukti karena negara telah mengakui dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagai mana telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 yang berbunyi :

- 1) Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

2.1.2.2. Pengertian Gender

Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mendefinisikan secara tepat arti kata gender karena merupakan kata baru. The Women's Studies Encyclopedia mengklaim bahwa gender adalah konstruksi budaya. Pendapat ini berusaha untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan saat mereka dewasa dalam masyarakat dalam hal peran yang mereka mainkan, perilaku mereka, dan karakteristik emosional mereka.

Gender menurut Deaux dan Kite (2013) dalam Ikhlasiah (2012, hlm. 13) ialah bangunan sosial dan kultural, yang menjadi pembeda antara karakteristik maskulin dan feminim. Maskulin dan feminim ini memiliki sifat yang relatif dan bergantung pada konteks sosial maupun budaya masyarakatnya. Gender berdampak pada bagaimana laki-laki dan perempuan diharapkan mampu berpikir atau bertindak sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya di wilayah mereka

yang beragam dalam hal keyakinan atau ideologi. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan menyebut "gender" sebagai bentuk dan budaya atas perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang digunakan untuk menandakan pembagian kerja yang dianggap pantas untuk laki-laki atau perempuan. Menurut Patini (2013) dalam Karwati (2020) gender merupakan pembangunan sosial budaya masyarakat yang dibentuk dalam menjalankan perannya masing-masing. Yang membedakan karakter laki-laki dan perempuan disebut jenis kelamin (seks) yang bersifat kodrati dan tidak bisa dirubah karena hakikatnya datang dari sang pencipta. Berdasarkan sosial budaya perbedaan laki-laki dan perempuan (gender) menyangkut peranan, fungsi, tugas dan tanggung jawab di masyarakat.

Akibat pembagian peran atau tanggung jawab sesuai dengan konstruksi sosial peran dan tanggung jawab, dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa kesetaraan gender mengacu pada adanya kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah baik bagi laki-laki atau perempuan.

2.1.2.3 Kesetaraan Gender Menurut Islam

Islam berpendapat bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak dibedakan satu sama lain. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan sudah melakukan perubahan menjadi individu yang mengidentifikasi jenis kelamin mereka sesuai dengan kodrat mereka sendiri. Sebaliknya, Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Allah telah menganugerahi perempuan dengan lebih banyak potensi dan keterampilan daripada laki-laki. Ini adalah sifat-sifat yang Allah berikan kepada manusia. Sangatlah jelas bahwa Allah menciptakan manusia yang satu dengan manusia lainnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 1 Al-Qur'an. Semua dihadapan Allah itu sama, sama-sama keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Maka surat ini menegaskan bahwasannya hak, kewajiban dan status manusia sama. Jadi tidak diperlukan perbedaan baik golongan tertentu, suku, ras, dan etnis gender lainnya. Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki dengan bentuk fisik dan tabiat

yang berbeda. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah *subhanahu wata'ala* baik itu fisik maupun mental diatas perempuan jadi pantas jika laki-laki ini bisa menjadi pemimpin daripada perempuan.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 menjelaskan bahwa islam sudah menetapkan perihal setiap pasangan memiliki kewajiban masing-masing. Suami yang berkewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, merawat, serta mengasuh mereka dan tugas yang lainnya sesuai dengan kemampuannya, mengajar anak perempuan, mengurus sekolah mereka dan pekerjaan lain yang khusus untuk perempuan. Jika perempuan meninggalkan kewajibannya dirumah, itu artinya dia mengabaikan rumah serta penghuninya. Hal ini memiliki efek terbelahnya keluarga. Islam adalah agama yang menawarkan cara hidup yang memungkinkan orang untuk memahami lingkungan mereka. Khalifatullah fil ardh memiliki tugas untuk melestarikan dan memajukan alam, menyebarkan kesadaran, dan bekerja untuk melestarikan peradaban manusia jika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari misi-Nya. Hal ini disebabkan bahwa Islam adalah agama universal dan beberapa Rahmat Lil-Alamin diturunkan oleh Allah. Jadi perempuan didalam islam merupakan hamba Allah yang memiliki peran penuh dan memiliki martabat yang setara dan melakukan amanah yang sama dengan laki-laki.

Tetapi saat ini ditemukan bahwa ajaran Islam dan realitas kehidupan sehari-hari bertentangan satu sama lain. Untuk menerapkan ajaran ini dalam kerangka budaya Islam, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Perempuan terus tertinggal dari laki-laki di berbagai bidang. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain, saling melayani, dan saling meninggikan, sebagaimana dijelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an. Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan setara. Tapi yang menjadi masalah pada saat ini mengenai implementasi hal tersebut. Ada beberapa faktor seperti lingkungan, tradisi patriarki, sistem (baik itu sistem ekonomi maupun politik), dan sikap atau perilaku dari individu yang bisa menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender. Selain itu budaya

yang kuat bagi kebanyakan orang yang menganggap perempuan tidak terlalu aktif di depan umum.

2.1.2.4 Kesetaraan Gender menurut Tradisi

Tradisi merupakan segala bentuk dari kebiasaan, kaidah, nilai, norma, yang mengatur tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Yang dimana masyarakat itu sendiri merupakan wadah untuk setiap individu mengembangkan kebudayaan. Setiap anggota masyarakat ini mempunyai nilai sosial budaya yang merupakan hasil dari rekayasa manusia sebagai anggota masyarakat. Tidak peduli jenis kelamin mereka, semua orang memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menegakkan moral yang ditetapkan secara sosial. Tradisi adalah sistem nilai yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Emil Durkheim, bentuk realitas sosial berarti bahwa segala sesuatu yang berada di luar manusia bersifat mengikat, dan berlaku umum bagi setiap individu dalam masyarakat.

Gender merupakan konstruksi sosial yang sudah ada dalam kehidupan sosial. Salah satu budaya yang penting serta berpengaruh mengenai isu kesetaraan gender di masyarakat adalah budaya patriarki. Yang mana ideologi patriarki memperlihatkan bahwa laki-laki adalah segalanya, berkuasa layak untuk didahulukan, pengambil keputusan utama, serta penentu segalanya. Budaya patriarki ini yang membenarkan adanya peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Yang diantaranya adalah :

1. Laki-laki biasanya lebih dominan dilingkup publik serta diluar rumah, misalnya peran laki-laki ini mencari nafkah dimana laki-laki mendapatkan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan karir.
2. Perempuan biasanya lebih memegang kendali di rumah dan keluarga, di mana mereka bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, perempuan jarang mengambil pendapatan atau menemukan peluang kerja.

Berdasarkan perbedaan biologis yang melekat, laki-laki dan perempuan diberi tugas berbeda dalam budaya patriarki ini. Laki-laki kodratnya yaitu mencari nafkah, mendapatkan martabat sedangkan perempuan hanya bergelut dengan kodratnya. Dalam kesetaraan gender peran ini tidak didasarkan pada jenis

kelamin, bahwa peran tertentu hanya dilakukan oleh laki-laki dan sebaliknya peran lain hanya untuk perempuan. Dalam kehidupan sosial, ada tugas dan peran tertentu yang dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, dan ada waktunya kewajiban tersebut dapat ditukar sedemikian rupa sehingga tidak terjadinya konflik antar gender. Pendapat tentang gender adalah sifat mendasar yang dibawa sejak lahir oleh laki-laki dan perempuan yang merupakan produk dari pengaruh sosial atau budaya.

Pendapat yang meluas dimasyarakat bahwa perempuan termasuk dalam kelas sosial yang lebih rendah, sering disebut sebagai warga kelas sosial yang lebih rendah, bahwa keberadaan mereka kurang diperhatikan. Aspek yang berkontribusi dalam pembagian peran ke dalam ranah rumah tangga dan ranah publik, di mana laki-laki dipandang aktif dalam ranah publik dan perempuan terlihat aktif dalam ranah domestik, merupakan pengertian tentang ketidaksetaraan ini. Berbagai lembaga dan organisasi sosial telah mendukung konsep ini, dan selanjutnya menjadi fakta bahwa perempuan dan peran yang mereka mainkan kini menjadi bagian dari realitas masyarakat.

2.1.2.5 Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Gibson dan Hodgets dalam Hasto, Purnomo, dkk (2022) merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui hubungan pribadi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melaksanakan tugas-tugas tertentu daripada jenis kelaminnya menentukan apakah mereka memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki hak untuk berpartisipasi dalam posisi kepemimpinan. Menurut Kanter dalam Hasto, Purnomo, dkk (2022) menunjukkan bahwa pemimpin perempuan memiliki empat sifat kepemimpinan yang unik, adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki sifat keibuan, yang mencakup rasa empati yang tajam dan kemampuan untuk memperhatikan masalah apa pun yang mungkin dialami bawahannya.
- 2) Memiliki rasa empati yang kuat secara alami. Perempuan dalam peran kepemimpinan diharapkan melindungi pengikut mereka karena mereka

melihat pengikut mereka sebagai bagian penting dari identitas mereka sendiri sebagai pemimpin.

- 3) Memiliki sifat yang mendorong motivasi, dimana perempuan selalu mendukung dan memotivasi mereka yang berada di bawah asuhannya.
- 4) Perempuan mempunyai ketegasan

Menurut teori gender dan kepemimpinan yang telah dipaparkan, kedua jenis kelamin berhak atas perlindungan hukum yang sama meskipun pada kenyataannya laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki ciri khas tertentu. Laki-laki biasanya lebih mementingkan menyelesaikan tugas, menegaskan kepemimpinan mereka, dan mengendalikan lingkungan mereka. Sebaliknya, perempuan lebih cenderung memprioritaskan kualitas pekerjaan, dan membangun kerjasama. Hal tersebut menurut Raven dan Rubin dalam Hasto, Purnomo, dkk. (2022), karena karakter maskulin laki-laki memiliki sifat agresif, kebebasan, objektivitas. Sedangkan, sifat feminin yang sering dimiliki oleh perempuan dibedakan oleh tingkat dominasi emosional yang lebih tinggi dalam hubungan interpersonal dan minat yang lebih kuat dalam interaksi sosial. Akibatnya, perbedaan kepribadian laki-laki dan perempuan dalam peran kepemimpinan menunjukkan bahwa setiap jenis kepemimpinan memiliki kesulitannya sendiri-sendiri. Konsepsi gender Soekarno dalam Hasto, Purnomo, dan lain-lain (2022) melalui tokoh Sarinah harus diperhitungkan. Laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dan saling mendukung dalam segala aspek kehidupan.

2.1.2.6 Kesetaraan Gender dalam Politik

Pada dasarnya, politik adalah upaya untuk mendapatkan kekuasaan atas proses pengambilan keputusan, termasuk memiliki akses kontrol dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Menurut Rod Hague et al. dalam Tridewiyanti (2012), politik digambarkan sebagai proses di mana organisasi membuat keputusan yang mengikat dengan berusaha mengidentifikasi perbedaan di antara masing-masing anggotanya. Sementara itu, Miriam Budiardjo dalam Tridewiyanti (2012) bahwa politik dapat dibagi menjadi lima kategori. Berikut ini adalah bagian kategori tersebut: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan

keputusan (*decision making*) kebijakan (*policy, beleid*) dan pembagian peran kekuasaan (*distribution*).

Ada banyak contoh ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam peran perempuan di masyarakat, yang biasanya terbatas di rumah. Kebutuhan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik menjadi semakin nyata. Fakta bahwa kedua jenis kelamin memiliki cita-cita yang sama bahwa laki-laki juga harus peka dan lebih berhati-hati untuk berpartisipasi dalam pekerjaan rumah. Peran gender yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan tidak harus sama, melainkan dapat bergeser dan berubah sesuai dengan landasan konstruksi sosial masyarakat. Memang benar bahwa laki-laki mendominasi dalam politik, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, perempuan mulai memiliki akses politik yang lebih terlihat, terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik praktis.

Ada empat faktor yang secara khusus mendorong pendapat bahwa perempuan harus lebih banyak berpartisipasi di lembaga legislatif. Yaitu pertama, tugas atau tanggung jawab yang khusus untuk perempuan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa sangat penting bagi perempuan untuk terwakili dalam pengaturan di mana keputusan dibuat. Jika perempuan dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, hal itu juga meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat umum, khususnya di kalangan perempuan. Kedua mengenai pendapat keadilan. Untuk mencapai kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan harus menempati jumlah kursi yang sama di badan legislatif. Ketiga, pertimbangkan masalah perempuan. Perempuan harus terwakili dalam forum politik formal agar dapat menganjurkan hak-hak perempuan secara efektif. Keempat adalah perbaikan institusi demokrasi. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya bagi perempuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam posisi otoritas dalam menghidupkan ruang publik dan lingkungan politik saat ini. (Squires, 2000) dalam AIRafni (2013).

2.1.2.7 Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Nasional

Menurut Deddy T. Tikson (2005) dalam Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016) Pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang

diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Setiap negara diharapkan memperhatikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam melaksanakan semua kebijakan dan bentuk pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan dalam mencapai target 5 point SDGs, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender dalam pengertian ini mengacu dalam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan memberdayakan mereka baik secara politik, ekonomi, dan pendidikan. Pemberdayaan politik dapat membantu orang melihat potensi dan kelayakan mereka sendiri dan menjadi lebih sadar akan hal itu. Dalam hal pemberdayaan politik mencakup berbagai macam unsur, seperti mencegah perempuan menganggur, mengenali potensi dan kecerdasan perempuan, serta membantu mengurangi kemiskinan.

Kesetaraan gender akan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seiring dengan perkembangannya ke depan. Selain itu, Negara Indonesia harus memberikan akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Negara wajib menerapkan pertanggungjawaban dalam hal ini sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban, contohnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menghilangkan prasangka dari segala aspek bidang pelayanan kesehatan, khususnya yang menyentuh pelayanan keluarga berencana.
- 2) Negara harus mengontrol pembatasan politik di bidang ekonomi dan sosial untuk menjalankan fungsinya sebagai penyedia ekonomi. Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank, hipotek, dan jenis kredit modal lainnya.

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan atau mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasional.

2.1.2.8 Kesetaraan Gender dalam Sosial Ekonomi

Menurut Hafezt dalam Mustam A. (2017) analisis antropologi tentang perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari analisis tentang keluarga. Keluarga dan ekonomi merupakan dua hal yang saling berhubungan, meskipun keduanya terlihat terpisah satu sama lain. Ketidakseimbangan gender mengacu pada ketidakseimbangan akses ke sumber-sumber lain dalam masyarakat. Sosial ekonomi ini menuntut persamaan peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu menempatkan perempuan sebagai seseorang yang berada di samping bukan seseorang yang berada di depan.

Koentjaraningrat dalam Mustam. A (2017) menilai, bahwa sebuah perekonomian tidak mungkin dapat dibangun apabila sikap saling merendahkan kualitas, sikap tidak bertanggung jawab dan berbagai ciri-ciri mental negative lainnya masih berakar dan berada dalam mentalitas manusia Indonesia. Selanjutnya Koentjaraningrat menawarkan solusinya, bahwa untuk membangun mentalitas yang cocok bagi pembangunan ekonomi ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu unsur-unsur nilai budaya yang menghambat harus dirombak dan sikap-sikap negatif yang berkembang harus dipulihkan.

2.1.3 Ketidakadilan dan Keadilan Gender

Bentuk ketidakadilan dan keadilan gender menurut Iklasih (2021, hlm. 25-28) menjelaskan bahwa :

2.1.3.1 Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan perbedaan peran dan posisi pada saat ini tidak akan pernah menjadi masalah selama semua itu berjalan dengan adil. Tapi kenyataannya perbedaan peran tersebut membuat keterbatasan gerak kedua belah pihak sehingga muncul ketidakadilan ini. Terutama pada perempuan, yang pada kenyataannya masih banyak hal yang merugikan perempuan. Seperti anak perempuan diasumsikan tidak perlu untuk sekolah tinggi, tidak diperlukan juga untuk pendidikan yang berkelanjutan karena pada akhirnya menganggap bahwa perempuan ini akan melakukan pekerjaan yang domestik saja. Penyebab awal dari kesenjangan gender yang sering dialami perempuan dalam masyarakat saat ini adalah kesenjangan gender yang terjadi di

banyak bidang kehidupan, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Pandangan ini didukung oleh pemahaman bahwa kesenjangan gender diakibatkan oleh sistem dan institusi yang mencitrakan laki-laki dan perempuan tersebut dalam peran sebagai korban sistem tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Fikih (1998) dalam Ikhlasiah (2021 halaman 25)

Ikhlasiah (2021, halaman 26–27) mengklaim bahwa ada banyak cara di mana ketidakadilan gender ini bisa berbentuk subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda. Ketidakadilan tersebut, yang terdiri dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan berikut ini, saling terkait dan berdampak satu sama lain adalah sebagai berikut:

1) Subordinasi

Hal ini menunjukkan bahwa beberapa penilaian dan tindakan yang terkait dengan peran yang dimainkan oleh satu jenis kelamin lebih diprioritaskan daripada yang terkait dengan peran yang dimainkan oleh jenis kelamin lainnya.

2) Marjinalisasi (Peminggiran)

Khususnya proses pergeseran atau marginalisasi. Mereka percaya bahwa perempuan lebih rajin, oleh karena itu mereka menyekolahkan perempuan untuk menjadi guru, perawat, dan sekretaris.

3) Beban ganda (*Double Burden*)

Hal ini menandakan bahwa salah satu jenis kelamin diberikan beban kerja yang lebih berat dibandingkan jenis kelamin lainnya. Beban yang ditanggung perempuan di rumah biasanya tidak berkurang saat mereka memasuki sektor publik. Penting untuk memenuhi tugas ganda ini baik di dunia publik maupun domestik.

4) *Streotip*

Dengan kata lain, pelabelan ini ditujukan kepada orang atau kelompok tertentu berdasarkan anggapan yang salah. Kelompok atau jenis kelamin tertentu seringkali menjadi sasaran pandangan negatif, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.

5) Kekerasan

Hal ini menunjukkan bahwa jenis perilaku, baik verbal maupun nonverbal,

dilakukan oleh individu atau kelompok individu sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi negatif bagi orang yang menjadi sasarannya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan psikologis.

2.1.3.2 Keadilan Gender

Konsep keadilan gender ditegaskan dalam Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa keadilan gender adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Contoh ketidakadilan gender antara lain penindasan, marginalisasi, memikul beban ganda, stereotip, dan kekerasan adalah hal-hal yang perlu diatasi oleh pemerintah terkait keadilan gender.

Tujuan utama pengembangan studi gender pada akhirnya adalah pengurangan dan penghapusan ketidakadilan. Maka, studi tentang gender akan menghasilkan keadilan sosial, dan keadilan sosial semacam ini tidak mungkin tercapai kecuali ada keadilan gender dalam masyarakat. Kondisi di mana laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk mewujudkan hak dan potensi mereka, untuk berkontribusi pada pencapaian politik, ekonomi, sosial, atau budaya, dan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keuntungan dari kemajuan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan gender, menurut Ikhlasiah (2021, halaman 28), adalah sebagai berikut :

- 1) Jangan pernah menyerah memperjuangkan hak asasi manusia karena kesetaraan gender merupakan komponen yang sangat penting.
- 2) Secara konsisten berupaya memajukan dan menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang sehat di semua organisasi sosial dengan mengikutsertakan perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan.
- 3) Pendidikan sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender karena memberikan kesempatan baik laki-laki atau perempuan untuk mempelajari keterampilan dan informasi yang mereka butuhkan guna berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

2.1.4 Peran Gender

Menurut teori sosial Parson dalam Puspitawati (2014) peran adalah sekelompok harapan yang terorganisir terkait dengan konteks sosial tertentu yang

memiliki kekuatan untuk membentuk orientasi motivasi seseorang terhadap orang lain. Melalui norma budaya, model, atau contoh perilaku ini, orang belajar siapa mereka di hadapan orang lain dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pemahaman yang kuat tentang sosiologi membutuhkan pemahaman tentang pendapat peran karena menunjukkan bagaimana pengaruh sosial membentuk dan menyesuaikan perilaku individu. Pengertian peran dapat dijelaskan dengan istilah paling sederhana sebagai berikut :

- 1) Peran adalah unsur dinamis yang muncul dari status yang terpola dan dipusatkan pada hak dan kewajiban tertentu.
- 2) Kedudukan seseorang dalam suatu kelompok atau situasi tertentu ditentukan oleh seperangkat harapan dari orang lain mengenai sikap yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan, dan peran dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam kelompok atau situasi itu.
- 3) Keinginan seseorang untuk memproyeksikan citra tertentu mempengaruhi bagaimana peran mereka disajikan kepada orang lain. Maka, peran adalah konvensi budaya yang terkait dengan status orang yang dibicarakan.
- 4) Sebuah evaluasi dari berbagai peran yang telah dimainkan, termasuk yang mungkin melibatkan nilai positif atau negatif, tinggi atau rendah, atau banyak atau sedikit. Salah satu kriteria yang mempengaruhi peran gender apa yang akan diberikan kepada seseorang dalam suatu komunitas adalah posisinya sebagai perempuan atau laki-laki, yang sudah mencakup kedalam penilaian.

Ada beberapa istilah yang kaitannya dengan peran gender. Konsep ini berasal dari model analisis gender yang dibuat oleh Moser dan Harvard, meliputi aktivitas produktif, reproduktif, dan sosial:

1. Kegiatan produktif, kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mencari nafkah. Karena kegiatan ini secara langsung menghasilkan uang atau benda yang bernilai maka disebut sebagai kegiatan ekonomi. Contohnya adalah bekerja menjadi buruh, petani, pengrajin.
2. Kegiatan reproduktif ialah tindakan yang melibatkan pemeliharaan, pengembangan, atau pemeliharaan sumber daya manusia biasanya terjadi dalam keluarga. Kegiatan yang dalam beberapa sumber disebut sebagai

reproduksi sosial ini sering terjadi dalam kaitannya dengan tanggung jawab rumah tangga atau sosial tetapi tidak menghasilkan pendapatan. Contoh peran reproduksi adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, tugas-tugas domestik dan reproduksi tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan datang (misalnya masak, bersih-bersih rumah)

3. Kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya yaitu Tindakan anggota masyarakat berdampak pada bidang politik, sosial, dan kemasyarakatan. Penyediaan dan pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh semua orang ini adalah penyediaan air bersih dan irigasi, pengoperasian sekolah dan lembaga pendidikan, serta prakarsa pemerintah daerah adalah beberapa contoh dari kegiatan tersebut. Meski kegiatan ini berpotensi menghasilkan pendapatan, namun juga memiliki risiko kerugian finansial.

"Keluarga inti", yang didirikan Parson pada tahun 1955 dan menganut norma gender konvensional pada masa itu, menjadi jenis keluarga yang paling umum selama periode tersebut (Puspitawati, 2014, halaman 3). Menurut Parsons, fungsi maskulin bersifat instrumental, sedangkan peran feminin bersifat ekspresif. Model A dari model Parson menggambarkan pembagian peran gender yang lengkap antara laki-laki dan perempuan, sedangkan Model B menggambarkan penggabungan ideal dari batas peran gender antara laki-laki dan perempuan, menerangi posisi ekstrim dari peran gender. Ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana model Parson dapat digunakan untuk menunjukkan betapa ekstremnya peran gender. Tabel berikut dapat digunakan untuk memahami model Parson:

Tabel 2.1
Peran Gender menurut Talcott Parson

Aspek	Model A: Pemisahan Peran antara Laki-Laki dan Perempuan	Model B : Peleburan Peran antara Laki-Laki dan Perempuan
Pendidikan	Pendidikan spesifik gender, kualifikasi profesional tinggi hanya penting untuk laki-laki	Anak laki-laki dan perempuan bersekolah di sekolah yang sama, dan kedua jenis kelamin menerima pendidikan yang setara.
Profesi	Tempat kerja profesional bukan tempat utama perempuan, karir dan profesional tinggi tidak penting untuk perempuan	Karir sama pentingnya bagi laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, sangat penting bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap prospek pekerjaan.
Pekerjaan dirumah	Pemeliharaan rumah dan pengasuhan anak merupakan fungsi utama perempuan, partisipasi laki-laki pada fungsi ini hanya sebagian saja	Laki-laki dan perempuan sama-sama harus melakukan semua tugas rumah tangga. Konsekuensinya, kontribusi suami dan istri adalah sama.
Pengambilan keputusan	Hanya ketika ada perselisihan, seperti ketika memilih tempat tinggal, sekolah, atau melakukan pembelian, laki-laki itu yang terakhir menanganinya.	Laki-laki tidak dapat mendominasi perempuan, harus ada kesetaraan
Pengasuhan anak dan pendidikan	Perempuan menangani sebagian fungsi besar untuk mendidik anak dan	Laki-laki dan perempuan sama-sama berkontribusi pada fungsi ini.

Aspek	Model A: Pemisahan Peran antara Laki-Laki dan Perempuan	Model B : Peleburan Peran antara Laki-Laki dan Perempuan
merawatnya setiap hari		

Sumber: Parson (dalam Puspitawati, 2014)

Namun kenyataannya, posisi seperti ini (model A atau model B) jarang terjadi di masyarakat. Faktanya karena perempuan diharapkan melakukan tugas sebagai pekerja dan ibu rumah tangga pada saat yang sama, ada "beban ganda" yang ditempatkan pada mereka dalam budaya kita. Akibatnya dengan tahapan perkembangan keluarga, peran gender yang dimainkan masing-masing suami dan istri tidak tetap, sebaliknya mereka dapat berubah seiring dengan perkembangan keluarga (Puspitawati, 2014 hlm. 4). Padahal, karena berpotensi mempengaruhi pendapat setiap orang, bagaimana peran gender diterapkan dalam keluarga dan kehidupan sosial menjadi sangat penting. Termasuk dalam memilih pasangan, rumah, karir, bidang pendidikan, bisnis, bahkan cara mengajar anak-anak. Struktur sosial, komunitas, dan nilai-nilai sosial telah berubah akibat dari pergerakan global dan tren industrialisasi. Maka tingkatan sosial ekonomi dan psikologis di setiap individu, keluarga, dan masyarakat merupakan akibat dari perubahan ini. Selain perubahan peran gender antara laki-laki dan perempuan, perkembangan ekonomi dan teknologi juga berdampak pada perubahan nilai-nilai seseorang dan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kehidupan, nilai-nilai bersama, dan nilai-nilai keluarga (Puspitawati, 2014 hlm 4) dalam Anita, 2015.

2.1.5 Teori Sosiologi mengenai Gender

2.1.5.1 Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional dalam Iklasian (2021, hlm. 36-38) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengakui bahwa kehidupan sosial ini beranekaragam. Jumlah pemeran yang cukup merupakan syarat terjadinya sistem struktural fungsional, yang menjadikan fungsi ini menjadi salah satu sistem yang bisa berjalan secara harmonis dan stabil.

Menurut Macionis (2012) dalam Ikhlasiah (2021, hlm. 37) sistem tersebut bisa terjadi dalam sistem pada bidang pendidikan, ekonomi, agama, politik, rumah tangga, serta dalam gender.

Teori struktural fungsional mengakui adanya berbagai keberagaman dalam kehidupan sosial. Keanekaragaman ini membentuk keragaman fungsi yang dilakukan oleh individu sesuai dengan posisinya dalam struktur suatu sistem, dan keragaman inilah yang menjadi sumber utama darimana struktur masyarakat berasal. Sebagai contoh, pertimbangkan bahwa organisasi sosial memiliki anggota yang dapat mengambil peran kepemimpinan, yang lain naik pangkat untuk menjadi sekretaris atau bendahara, dan yang lainnya terus menjadi anggota kelompok yang aktif. Perbedaan dari berbagai peran tersebut memiliki fungsi yang membantu organisasi mencapai tujuannya, tidak hanya untuk kepentingan individu anggota organisasi. Struktur dan peran di dalam organisasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai yang mendasari sistem komunitas (Megawagi, 1999), sebagaimana dikutip dalam Ikhlasiah (2021, hlm. 37)

Ketika membahas peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, teori ini mengacu pada masyarakat pra-industri yang tergabung dalam struktur sosial. Dipercaya bahwa laki-laki berperan sebagai pemburu dan perempuan berperan sebagai peramu. Laki-laki memiliki tanggung jawab untuk bisa memberi makan keluarga mereka dan diharapkan menghabiskan banyak waktu di luar rumah dalam tanggung jawab mereka sebagai pemburu. Posisi perempuan di rumah kini kurang luwes terkait tanggung jawab reproduksi seperti hamil, merawat, dan menyusui bayi. Pemberian tugas ini telah bekerja dengan baik dan berhasil dalam membina masyarakat yang stabil. Dalam peradaban tertentu, orientasi seksual berdampak signifikan terhadap pembagian kerja berbasis gender (gender).

Menurut Talcott Parsons dan Bales, pembagian peran secara seksual merupakan fenomena alam (Umar, 1999) dalam Ikhlasiah (2021, hlm. 38). Pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri akan menghasilkan pernikahan yang langgeng dan bahagia. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan pada masing-masing fungsi, sistem keutuhan keluarga dapat

menjadi tidak seimbang. Distribusi tugas dan tanggung jawab yang lebih adil dapat dicapai dengan menggunakan pembagian kerja tradisional berdasarkan gender.

2.1.5.2 Teori Perubahan Sosial

Kingsley Davis dalam Eva (2019, halaman 13) menegaskan bahwa perubahan sosial adalah komponen penting dari perkembangan budaya. Baik faktor internal maupun eksternal mempengaruhi proses perubahan sosial. Pengaruh dari dalam masyarakat disebut sebagai pengaruh internal. Perubahan masyarakat disebabkan oleh faktor internal seperti kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, penemuan ilmiah, dan keyakinan agama. Peristiwa eksternal seperti bencana alam, letusan gunung berapi, dan tsunami adalah beberapa contoh yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Suatu proses yang terjadi dalam sistem sosial itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Selama kurun waktu tertentu, perubahan ini dapat diamati. Perubahan yang terjadi bisa berupa perbaikan (progress) atau kemunduran (regressions) terhadap tujuan (regression). Outcome yang di cari adalah perubahan sosial yang menuju kemajuan, sama dengan konsep pembangunan pada umumnya. Sedangkan disisi lain penurunan adalah hasil yang tidak dikehendaki bagi masyarakat.

Gender adalah peran sosial yang berkembang dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dimasyarakat. Konsep gender menggambarkan pola hubungan yang tercipta secara sosial antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan kesenjangan kelas yang tidak setara. Interaksi berbagai faktor, seperti ideologi, sejarah, etnis, ekonomi, dan budaya, telah menyebabkan ketidaksetaraan peran gender ini. Munculnya kesetaraan gender dalam masyarakat mengakibatkan penolakan terhadap peran gender konvensional yang menempatkan laki-laki sebagai tanggung jawab untuk mengelola persoalan masyarakat sementara perempuan bertanggung jawab atas ranah domestik (keluarga). Ada pertentangan antara ranah publik dan domestik serta pembagian aktivitas reproduktif dari aktivitas produktif. Kegiatan reproduksi selalu dikaitkan dengan perempuan dan tenaga kerja tidak berbayar, sedangkan laki-laki lebih

cenderung terlibat dalam kegiatan produksi yang berkaitan dengan pekerjaan di sektor publik.

Perpecahan keseimbangan struktur sosial dan normatif, serta perubahan budaya di antara anggota setiap struktur sosial, semuanya merupakan konsekuensi dari perkembangan sosial, yaitu bagaimana persepsi tentang kesetaraan gender ini muncul. Lebih khusus lagi, perubahan masyarakat adalah apa yang menyebabkan perubahan ini. Misalnya di beberapa tempat di mana satu jenis kelamin harus mendominasi karena struktur sosial, orang cenderung percaya bahwa satu jenis kelamin lebih cocok untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akibat perkembangan sosial tersebut, pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender berubah, dan perubahan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal masyarakat ini.

2.1.6 Teori Kesetaraan dan Keadilan Gender

Menurut Sasongko (2009) dalam Ikhalsiah (2021, hlm. 34-36), terdapat beberapa aliran teori mengenai kesetaraan dan keadilan gender ini diantaranya :

2.1.6.1 Teori Nurture

Teori nurture menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan ini karena konstruksi sosial budaya (Mose 1996) dalam Ikhlasiah (2020 hlm. 35). Kemudian hal ini yang akan menghasilkan tugas dan peran yang berbeda. Perbedaan tersebut juga merupakan pemicu dari kenapa perempuan selalu memperoleh ketertinggalan, serta peran yang diabaikan baik itu di keluarga, masyarakat maupun dalam bernegara.

Pandangan ini berpendapat bahwa konstruksi sosial merupakan penyebab perbedaan kelas sosial antara laki-laki dan perempuan. Aliran nurture yang sering dikendalikan oleh banyak negara sosialis komunis yang dianggap mampu memberantas berbagai strata sosial penduduknya, menganut teori konflik sosial). Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga kesetaraan yang proporsional atau bahkan menyeluruh dalam semua kegiatan masyarakat.

Teori ini berpendapat bahwa disparitas antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosio-kultural yang menetapkan peran dan kewajiban tertentu pada masing-masing gender. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh berbagai sebab, termasuk perbedaan yang menempatkan perempuan jauh di

belakang laki-laki dan menyebabkan masyarakat tidak menyadari tanggung jawab dan kontribusinya terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perempuan dan laki-laki diklasifikasikan ke dalam berbagai kelas sosial sebagai akibat dari konstruksi sosial yang khususnya, dianggap bahwa laki-laki termasuk kelas borjuis dan perempuan kelas pekerja.

2.1.6.2 Teori Nature

Teori ini menyatakan bahwa adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki ini merupakan suatu kodrat (Mosse, 1996) dalam Ikhlasiah (2020 hlm. 34). Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, masyarakat harus menerimanya dalam bentuk yang ada. Setelah itu, fungsi sebagai tanda mengenai tugas dan tanggung jawab memang berbeda dan perbedaan ini diperhitungkan. Maka, peran dan tanggung jawab khusus harus diisi oleh laki-laki atau perempuan. Konsep nature mengasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan masih dapat bergantian peran yang berbeda. Namun, beberapa kewajiban harus diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan karena kodrat mereka masing-masing dalam masyarakat sehingga tidak dapat diganti.

Pemahaman struktural dan fungsional yang mengakui adanya peran yang bervariasi dalam berbagai situasi telah dikembangkan sebagai hasil dari teori alam. Namun, hal ini adalah sesuatu yang memungkinkan selama pembagian kerja berlangsung secara demokratis dan dapat diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam suatu masyarakat. Pengaturan keluarga, khususnya antara suami dan istri adalah tempat yang paling sering terjadi.

Teori alam mengklaim bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini harus diterima karena hal tersebut merupakan kodrat yang. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda satu sama lain dapat digunakan untuk menunjukkan tugas dan tanggung jawab khusus yang harus dilakukan oleh masing-masing gender. Namun, karena perbedaan mendasar antara struktur beberapa peran dan tugas ini tidak dapat diganti satu sama lain. (Mosse, 1996) dalam Ikhlasiah (2020 hlm. 35)

2.1.6.3 Teori Equilibrium

Teori ini berpusat pada keberadaan hubungan yang seimbang serta harmonis antara laki-laki dan perempuan. Teori ini tidak berusaha untuk memperselisihkan antara peran laki-laki dan perempuan. Namun harus adanya kerjasama antara kedua belah pihak supaya bisa membangun keharmonisan hidup baik dalam keluarga, masyarakat, serta bernegara (Pilcher, dan Whelehan 2004) dalam Ikhlasiah (2020 hlm. 36). Didalam teori ini hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak diperlukan untuk dipisahkan, dan tidak juga berlandaskan struktur fungsional. Karena hal ini peran yang ada diantara laki-laki maupun perempuan berlandaskan pada kerja sama antara kedua belah pihak, bahwa mereka semua menganggap sama-sama memiliki kelebihan maupun kekuatan. Jadi baik laki laki- dan perempuan harus bisa bekerja sama sehingga bisa untuk saling mengisi satu sama lain. Yang intinya, teori ini sangat mementingkan kedua belah pihak untu bisa berjalan beringinan dalam menjalankan kehidupan. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut harus adanya perhitungan mengenai kepentingan kedua belah pihak yang harus dilakukan secara merata dan adil. Hubungan ini tercipta bukan untuk saling bertentangan, tapi hubungan yang bisa mengisi serta melengkapi satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan dilandasi oleh konflik, serta bukan pula struktural fungsional.

2.1.7 Analisis Gender

Analisis gender menurut Harien Puspita (2013) adalah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan gender melalui penyajian data, fakta, dan informasi tentang gender, khususnya data yang dibagi ke dalam kategori laki-laki dan perempuan berdasarkan akses, peran, kontrol, dan manfaat. Untuk menemukan dan mengungkap kedudukan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, analisis gender adalah proses penilaian fakta dan informasi tentang laki-laki dan perempuan secara terstruktur.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam analisis gender menurut Harien Puspita (2013) :

- a. Akses merupakan peluang maupun kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu
- b. Peran ialah Partisipasi, atau tindakan seseorang atau kelompok mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau dalam proses pengambilan keputusan
- c. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang maupun kekuatan untuk mengambil keputusan
- d. Manfaat ialah kegunaan sumberdaya yang bisa dinikmati secara optimal
- e. Kegiatan produktif yaitu profesi atau pekerjaan yang diikuti anggota komunitas untuk menghidupi diri mereka sendiri. Karena secara langsung menghasilkan uang moneter atau benda-benda fisik yang dapat dinilai mirip dengan kekayaan moneter, kegiatan ini juga dapat disebut sebagai kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ini adalah bekerja menjadi buruh, petani, pengrajin
- f. Kegiatan reproduktif ialah kegiatan yang sering dilakukan dalam lingkungan keluarga dan berkaitan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan yang menjamin kelangsungan sumber daya manusia. Kegiatan ini, yang sering disebut sebagai "reproduksi sosial", biasanya terjadi bersamaan dengan mengurus kewajiban keluarga dan tidak menghasilkan uang. Membesarkan dan merawat anak, pekerjaan rumah tangga dan kegiatan rumah tangga lainnya, serta reproduksi jenis pekerjaan sekarang dan masa depan, adalah beberapa contoh tanggung jawab reproduksi (misalnya, memasak dan membersihkan rumah).
- g. Kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya ialah penyediaan dan pemeliharaan sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap orang, seperti air bersih dan sistem irigasi, sekolah dan pendidikan, serta kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang berkaitan dengan politik, sosial, dan kemasyarakatan. domain. Baik kemampuan menghasilkan uang dari kegiatan ini maupun kesempatan untuk melakukannya.

2.2 Penelitian yang Relevan

- 2.2.1 Alan Sigit Fibrianto (2016) dengan penelitian berjudul “**Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas**

Maret tahun 2016". Hasil penelian ini bahwa yang menduduki jabatan tinggi dalam organisasi atau pemimpin organisasi yaitu laki-laki, perempuan hanya menduduki sebagai sekretaris dan bendahara, perempuan jarang menempati jabatan yang tinggi dalam sebuah organisasi hal ini masih belum memenuhi syarat adil gender. Semuanya harus didasarkan pada tingkat kemampuan individu daripada karakteristik fisik mereka, dan pilihan ini harus dibuat dengan pertimbangan yang adil bagi setiap orang. Laki-laki dan perempuan berhak atas hak yang sama dalam setiap aspek jika dilihat melalui perspektif konsep pengarusutamaan gender.

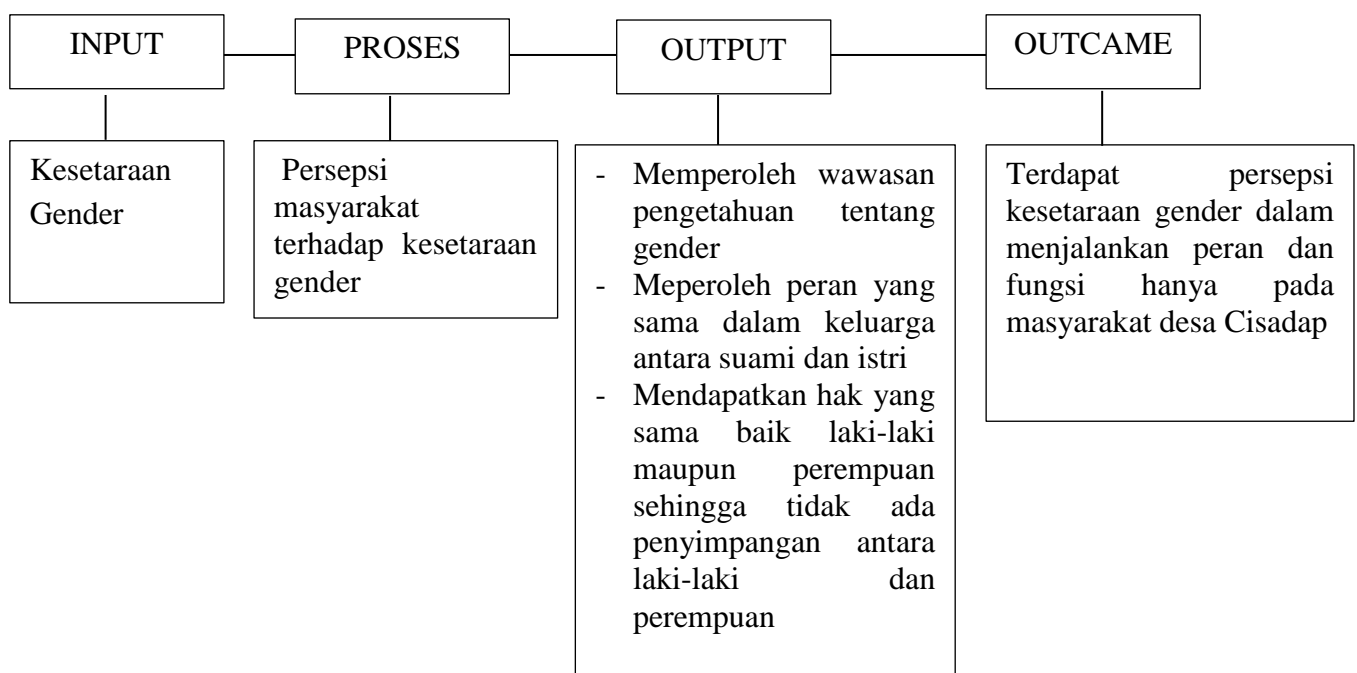
- 2.2.2 Dede Nurul Qomariah (2019) dengan penelitian berjudul **“Persepsi Masyarakat mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga”**. Hasil penelitian yang diperoleh ialah rata-rata masyarakat belum mengetahui perihal kesetaraan gender namun kesetaraan gender tersebut sudah banyak terjadi di dalam keluarga. Hal ini memperkuat bahwa masyarakat memang telah lama menerapkan kesetaraan gender, tapi mereka tidak menyadarinya. Ada juga masyarakat yang sudah mengetahui tentang makna kesetaraan gender ini karena didasari oleh tingkat pendidikan dan status sosial jadi informasi perihal kesetaraan gender sudah banyak diperoleh dari lingkungan kerja.
- 2.2.3 Rudi Aldianto,dkk (2015) dengan penelitian yang judulnya **“Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”**. Menurut hasil penelitiannya, kedua jenis kelamin sama-sama memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat di bidang-bidang seperti politik, tempat kerja, dan sistem pendidikan karena kedua jenis kelamin diberi kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender terjadi pada masyarakat ini karena perempuan suku Jawa bekerja untuk menghidupi keluarga dan mencari nafkah, meskipun istri mereka masih terkendala oleh kodratnya.
- 2.2.4 Resti Fauziah,dkk (2015) dengan penelitian berjudul **“Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender”**. Hasil dari penelitian

ini bahwa penyebab dari terjadinya kesetaraan gender ini masyarakat itu sendiri yang memiliki ketidakpahaman terkait makna dari kesetaraan gender yang bisa terjadi baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Masih banyak terjadi kasus yang merugikan perempuan yang merugikan satu pihak.

- 2.2.5 Puji Laksono (2017) dengan penelitian berjudul **“Konstruksi Gender di Pesantren”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian mahasiswi mendukung kesetaraan gender, ada juga sebagian mahasiswi yang tidak. Ada mahasiswi yang mendukung kesetaraan gender karena menurut mereka laki-laki dan perempuan harus memiliki peran yang sama, tetapi ada mahasiswi lain yang menentangnya karena menurut mereka karena laki-laki dan perempuan harus memiliki tanggung jawab yang berbeda menurut agama, posisi seperti itu tidak boleh. disamakan..

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Notoatmodjo (2012) adalah gambaran tentang keterkaitan dan hubungan antar gagasan atau variabel yang akan dikaji dan dinilai melalui kajian yang akan dilakukan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan **Gambar 2.1** menjelaskan bahwa kerangka konseptualnya yaitu Input data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Cisadap. Proses pelaksanaan penelitian ini melibatkan masyarakat di Desa Cisadap karena peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender. Temuan penelitian ini akan memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gender, mencapai kesetaraan peran bagi suami dan istri dalam rumah tangga, dan mencapai persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Inilah hasil yang akan dihasilkan oleh penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa Cisadap percaya laki-laki dan perempuan menjalankan peran dan fungsi gender masing-masing dengan cara yang sama.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan eksplisit mengenai sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti, yang dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ?